

# PENINGKATAN PRODUKTIVITAS REMAJA PUTUS SEKOLAH DI MASA KRISIS MELALUI PANTI SOSIAL BINA REMAJA

C. Elly KUMARI TJAHYA PUTRI  
Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

## ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini berdampak meningkatnya angka kemiskinan yang mencapai hampir 73 juta dari 207 juta jiwa penduduk Indonesia. Situasi demikian lebih lanjut akan memacu lajunya angka pertumbuhan remaja putus sekolah. Padahal kondisi perekonomian makin tidak menentu akibat krisis multidimensional berkepanjangan sehingga berdampak luas pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Antisipasi terhadap permasalahan tersebut merupakan prioritas. Dalam rangka mengantisipasi masalah tersebut perlu upaya meningkatkan produktivitas remaja putus sekolah diantaranya melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) sebagai wahana untuk meningkatkan potensi remaja putus sekolah, perlu mengembangkan model sistem manajemen bimbingan pelatihan ketrampilan, mental dan sosial secara integratif dengan instansi terkait dan pengusaha, sehingga para kelayan Panti Sosial Bina Remaja akan memperoleh bekal ketrampilan yang sesuai dengan pasaran kerja. Hal penting lainnya yakni perlu kiranya dilakukan penghitungan efisiensi, baik internal maupun eksternal, terhadap biaya pelaksanaan program bimbingan ketrampilan mental sosial kepada remaja putus sekolah dengan metode penghitungan *cost efficiency analysis* untuk menghitung efisiensi internal selanjutnya untuk menghitung efisiensi eksternal dipergunakan metode penghitungan *cost benefit analysis* untuk mengetahui *private rate of return* serta *social rate return*.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia pada tahun 2002 sebanyak kira-kira menjadi 207 juta orang. Jumlah penduduk yang besar di satu pihak menggambarkan potensi tenaga kerja yang dapat dimobilisasi untuk usaha produktif menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di pihak lain, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar menunjukkan tantangan yang harus dihadapi, tidak saja untuk penyediaan berbagai jenis kebutuhan penduduk seperti pangan, sandang papan, tetapi juga fasilitas kesehatan dan pendidikan,

serta kesempatan kerja yang luas. Masalah yang dihadapi Indonesia dewasa ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang begitu banyak menjadi potensi pendukung pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini. Kenyataan menunjukkan dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ternyata berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan angka kemiskinan menjadi hampir 73 juta keluarga miskin. Situasi demikian lebih lanjut akan meningkatkan pula jumlah remaja (pemuda) putus sekolah, serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Akhirnya angka jumlah pengangguran makin tinggi.

## 1.2. Permasalahan

1) Penduduk Indonesia termasuk dalam golongan struktur umur muda artinya sebagian besar penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur yang membutuhkan pelayanan masyarakat. Mereka sangat membutuhkan gizi dan fasilitas kesehatan yang baik supaya dapat tumbuh dengan baik. Misalnya dalam tahun 1980, terdapat 52,8 juta jiwa masuk dalam kelompok usia masuk sekolah 5-19 tahun (35,7%) dan mereka membutuhkan fasilitas pendidikan, dan 25,4 juta (35,7%) masuk dalam kelompok umur 20-29 tahun. Angka-angka tersebut makin bergeser meningkat, mengingat makin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar membutuhkan lapangan kerja dan sebagian besar remaja putus sekolah belum cukup berpengalaman. Jadi struktur penduduk usia muda membutuhkan: (1) Penyediaan fasilitas pendidikan, (2) Tuntutan penyediaan kesehatan, dan (3) Tuntutan penyediaan kesempatan kerja. Ini juga berarti sebagian kecil penduduk produktif yang menghasilkan barang dan jasa justru menopang kelompok penduduk tidak produktif ini. Pada masa krisis ekonomi dewasa ini ternyata jumlah penduduk usia muda menjadi beban karena rendahnya kesempatan kerja. Berarti angka pengangguran semakin tinggi mengingat sektor industri yang sering didambakan sebagai tulang punggung perekonomian belum berperan sebagaimana mestinya terutama dalam penyediaan lapangan kerja (Kompas / 4 / 2001). Masalah remaja putus sekolah bukan hanya menyangkut penyediaan tenaga kerja saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai faktor seperti

pendidikan, ketrampilan dan kesehatan. Tingkat penghasilan dan jaminan sosial berpengaruh pada keadaan gizi dan kesehatan di Indonesia, padahal keduanya umumnya masih rendah. Tahun 1995 tercatat 29,19% anak di bawah umur 5 tahun kekurangan kalori dan protein (di bawah kebutuhan konsumsi manusia).

2) Belum dilaksanakannya manajemen sistem pelatihan secara integratif antar departemen dan industri, terkait untuk menangani remaja putus sekolah. Dalam jangka menengah bagi tenaga kerja usia muda, yang belum memiliki pengalaman kerja, diperlukan perencanaan pendidikan yang berorientasi pada pasaran kerja. Namun betapa pun pendidikan formal/nonformal direncanakan tetapi sangat sulit untuk mampu menyediakan tenaga yang otomatis cocok antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Dunia pendidikan umumnya memerlukan waktu yang relatif panjang sedang teknologi berubah dengan cepat, sehingga dunia pelatihan yang didesain cocok dengan teknologi sekarang ini, lima tahun mendatang mungkin tidak sesuai dengan jamannya. Di samping itu sistem pendidikan yang demikian menjadi akan sangat mahal sedangkan relevansinya akan segera *out of date*.

3) Makin tingginya angka remaja putus sekolah di Indonesia, sebagai dampak adanya krisis ekonomi. Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional tahun 1997 jumlah angka putus sekolah pada tingkat SD/ Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 8.334.000 anak, dan tingkat SLTP / Tsanawiyah sebanyak 3.652.000 anak. Sejak terjadinya krisis jumlah membengkak menjadi 9.194.000 anak untuk tingkat SD/ Madrasah Ibtidaiyah dan 6.434.000 jiwa anak untuk tingkat SLTP/Tsanawiyah (Menuju masyarakat yang berketahanan sosial, 1999: 144). Selain itu, masih banyak anggapan di

masyarakat bahwa program rehabilitasi dan pelayanan sosial merupakan program yang bersifat karitatif, bukan program yang merupakan bentuk investasi manusia jangka panjang seperti halnya pendidikan.

## 2. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS REMAJA PUTUS SEKOLAH MELALUI PELATIHAN DAN BIMBINGAN KETRAMPILAN / SOSIAL-MENTAL PADA PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Masalah remaja putus sekolah merupakan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan, produktivitas sumber daya manusia dan pendidikan. Remaja putus sekolah berpendidikan rendah tanpa pengalaman berpotensi menciptakan pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja (yang berhubungan dengan ketrampilan, bidang keahlian, maupun daerah lahannya) dan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. Bila permintaan terhadap barang dan jasa berubah, boleh jadi pola permintaan terhadap tenaga kerja pun akan berubah. Perubahan permintaan terhadap barang dan jasa di satu pihak menyebabkan adanya barang dan jasa yang dulunya diminta dan diproduksi tetapi sekarang tidak lagi, misalnya industri pabrik sepatu dan peralatan rumah tangga yang semula permintaannya tinggi, maka setelah krisis ekonomi permintaan akan barang tersebut berkurang. Akibatnya mungkin dapat menimbulkan para pekerja terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya yang lama dan dipeker-

jakan pada pekerjaan yang baru. Dilain pihak akan menimbulkan adanya permintaan atas barang dan jasa yang dulunya tidak diproduksi. Untuk memproduksi jenis barang dan jasa yang baru itu diperlukan keahlian dan ketrampilan yang kemungkinan belum dimiliki oleh angkatan kerja yang ada.

Berdasarkan teori *human capital* yang dikemukakan oleh Schultz, pekerja itu jadi kapitalis tidak dari pengumpulan *stock*, tetapi dari pemilihan pengetahuan dan ketrampilan yang bernilai ekonomis. Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan itu diperoleh secara kumulatif selama memperoleh pendidikan di sekolah. Melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan inilah manusia menginvestasikan dirinya sendiri. Schultz juga menyatakan bahwa *human capital* lebih besar keuntungannya dibanding penanaman modal dalam bentuk uang. Sebagian besar perkembangan ekonomi di negara maju dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa manusia merupakan modal utama. Pendidikan bersama-sama dengan *human capital* lainnya seperti halnya kesehatan sangat besar sumbangannya bagi pembangunan sumber daya manusia.

Kondisi krisis saat ini menyadarkan orang betapa pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam kaitannya dengan SDM. Sejarah Jerman (eks Jerman Barat) sejak perang dunia II merupakan pelajaran yang patut disimak. Setelah perang dunia II kondisi Jerman tidak hanya kritis bahkan mengalami kehancuran, namun kemudian mampu bangkit kembali dan berhasil memperoleh kemajuan hebat seperti kondisi sekarang ini, hal tersebut berkat 4 faktor: 1) Industri yang sudah dimiliki walaupun dalam kondisi krisis, 2) Adanya dana dari *Marshal Plan* (program bantuan untuk memerangi kela-



paran, kemiskinan, keputusan serta kekacauan, 3) Sumber daya manusia yang tidak musnah, walaupun segala yang lain hancur, dan 4) Sikap sumber daya manusia Jerman yang suka bekerja keras dan suka berlomba menciptakan sesuatu kreasi baru sebagai hasil nilai tambah suatu produk (*added-value*). Sejarah Jerman telah membuktikan bahwa sumber daya manusia adalah bekal utama untuk mencapai kemajuan (Kompas, 15/11/ 1997).

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka pendidikan menjadi faktor yang paling dominan untuk meningkatkan kualitas bangsa. Menurut teori "*Human Capital*" yang dicetuskan oleh Theodore Schultz (1961) dan Denison (1962), pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan ketrampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan tersebut mempengaruhi timbulnya sejumlah penelitian mengenai nilai ekonomis dari pendidikan. Teori *Human Capital* merupakan suatu aliran pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk kapital lainnya seperti teknologi, mesin, tanah, uang dan sebagainya yang sangat menentukan pertumbuhan produktivitas suatu bangsa (Dunn, 1995: 22-23).

Melalui pendidikan seseorang akan mampu berpikir kritis, inovatif dan kreatif. Manusia terdidik yang telah mengalami proses pemberdayaan akan tampil sebagai manusia yang sadar akan kemampuan dirinya, matang emosi, memiliki motivasi berprestasi tinggi dan menjadi pribadi mandiri. Tetapi dalam kondisi krisis ekonomi, pemerataan kesem-

patan sangat rendah; masyarakat miskin tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya. Kebanyakan anak tersebut terpaksa putus sekolah sebab harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Padahal laju pertumbuhan penduduk makin meningkat. Akhirnya penduduk miskin makin terhimpit oleh kondisi yang tidak memungkinkan lagi memperoleh kesempatan bersekolah, sebab untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yaitu untuk makan pun sudah tidak mampu lagi.

Apple menyatakan bahwa keterbatasan dalam penyediaan dana pendidikan akan menimbulkan dua masalah: 1) Keterbatasan dalam jumlah tenaga pengajar yang berakibat terbatasnya alternatif program dan pilihan program yang ditawarkan. 2) Keterbatasan dalam penggantian sarana dan prasarana pendidikan yang penting untuk menunjang kurikulum, serta kualitas guru yang kurang memadai (Apple, 1994: 284-285). Berdasarkan pendapat di atas maka perlu kiranya penanggulangan anak putus sekolah, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang menaruh kepedulian pada bidang pendidikan. Masalah penanggulangan anak putus sekolah tidaklah mudah, sebab menyangkut beberapa aspek kehidupan anak secara kompleks. Menurut John Simmon, ciri khas anak-anak di negara berkembang yang kurang gizi, memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kemampuan membaca dan menulis serta menyelesaikan hitungan dan berpikir cerdas dan logis; kondisi ini akan berpengaruh pula terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dengan taraf hidup rendah seringkali berada pada tempat yang tidak menguntungkan dalam persaingan. Oleh sebab itu lingkungan keluarga, interaksi ke-lompok, kepribadian

maupun gizi akan berpengaruh pada proses pendidikan (Todaro, 1978, 243-245).

Mengacu pada pemikiran di atas maka penanggulangan masalah anak putus sekolah harus dilaksanakan secara terpadu. Pemecahan masalah remaja putus sekolah yang berumur muda dan belum memiliki pengalaman kerja berakibat, makin tingginya pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh struktur perekonomian yang belum maju, sehingga kurang mampu menciptakan cukup lapangan kerja produktif bagi seluruh angkatan kerjanya. Sifat pengangguran tenaga kerja di sebagian besar negara diwarnai oleh sifat perekonomian yang biasanya dualistis. Di negara berkembang sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan hanya sedikit yang tinggal di kota. Di desa sebagian besar orang hidup dari pertanian, kerajinan dan perdagangan kecil yang tradisional, lemah dan kurang renumeraktif. Tingkat pengangguran terbuka atau pengangguran penuh di pedesaan adalah rendah. Sebaliknya di kota, jumlah setengah pengangguran besar dan banyak yang berpendapatan rendah, tetapi tingkat pengangguran penuh lebih besar lagi.

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan meningkatkan mutu tenaga kerja sebagai proses berlanjut menuju ke arah tercapainya tenaga kerja yang produktif penuh disiplin, kreatif, dinamis serta memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Pendidikan sebagai suatu sistem kegiatan yang kompleks meliputi berbagai komponen berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai

elemen yang terlibat dalam pendidikan perlu dipahami, sehingga diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat ditinjau secara makro maupun mikro.

## 2.1. Pelaksanaan Pelatihan Dan Bimbingan Sosial Pada Panti Sosial Bina Remaja

Panti Sosial Bina Remaja merupakan wahana penyelenggara penyantunan pada remaja putus sekolah yang terlantar dengan memberikan kesempatan serta kemudahan, agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan jasmani, rohani maupun sosialnya, serta berupaya menumbuhkan dan meningkatkan ketrampilan kerja. Bentuk bimbingan dan penyantunan yang dipergunakan adalah asuhan dalam keluarga dengan sistem dalam panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial melalui beberapa teknik yaitu :

### 1) Bimbingan fisik

*Pemeliharaan kesehatan fisik remaja putus sekolah dilakukan, melalui upaya peningkatan gizi. Melalui Panti Sosial Bina Remaja remaja sehingga mereka memperoleh tambahan gizi untuk meningkatkan produktivitasnya.*

### 2) Bimbingan mental

Bimbingan mental meliputi bimbingan mental spiritual dan pelajaran etika dan budi pekerti. Pengungkapan dan penyelesaian masalah melalui *case work* dan *group work* oleh pekerja sosial serta pertemuan penyelesaian masalah melalui *case conference*. Bimbingan mental juga dilakukan untuk memotivasi kemandirian serta membantu menstimulir anak asuh agar memiliki kemampuan berprestasi di bidang usahanya lewat AMT (*Achievement Motivation Training*). Melalui bimbingan mental tersebut

dimaksudkan untuk membantu anak asuh agar mampu mengurus dirinya sendiri, mengembangkan konsep dirinya, agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bersikap realistis dalam menghadapi tantangan sehingga memiliki kemandirian agar tercipta suatu produktivitas tinggi.

### **3) Bimbingan sosial**

Bentuk kegiatan bimbingan sosial adalah dinamika kelompok. Tujuan diadakannya bimbingan sosial adalah mengembalikan fungsi sosial dari remaja putus sekolah. Perubahan sikap tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi/dorongan, kepercayaan diri yang tinggi, perasaan diperhatikan dan kasih sayang, sehingga perasaan rendah diri di kalangan remaja putus sekolah akan berkurang.

### **4) Bimbingan ketrampilan**

Pelatihan bimbingan ketrampilan dengan sistim dalam panti melalui Panti Sosial Bina Remaja, merupakan bentuk pendidikan nonformal yang sangat penting artinya untuk menyiapkan kemandirian remaja putus sekolah. Pendidikan formal sendiri tidak dapat memberikan pemecahan secara menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Philip H. Comb menyatakan, bahwa pelatihan ketrampilan yang merupakan bentuk pendidikan nonformal akan lebih efisien apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Ketrampilan yang diberikan disesuaikan dengan motivasi penduduk atau kelompok yang menjadi sasaran. 2) Penerapan ketrampilan jangan hanya tepat dari segi teknis, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara

fisik. 3) Metode pendidikan yang diterapkan harus sesuai dengan gaya belajar yang sesuai dengan motivasi dan kemampuan peserta belajar 4) Usaha pendidikan harus bersifat sinambung dan direncanakan secara baik (Combs & Ahmed, 1974: 244).

Indonesia kini menghadapi tantangan yang cukup berat, karena laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan taraf ekonomi masyarakat makin rendah, sehingga banyak remaja tidak dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, sedangkan daya serap ekonomi sangat kecil, terutama dalam sektor modern, karena kebanyakan remaja putus sekolah memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Padahal sektor modern tersebut sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi ketrampilan dan kemampuan profesional yang cukup tinggi. Oleh sebab itu remaja putus sekolah tidak mungkin terserap melalui sektor modern.

Masyarakat miskin tidak berpikir lebih jauh lagi untuk meningkatkan pendidikan. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan subsidi untuk pendidikan. Hal ini penting sekali sebab keterbatasan dana di bidang pendidikan akan menimbulkan masalah rendahnya mutu pendidikan, dan keluaran (*output*) pendidikan tidak relevan dengan lapangan pekerjaan sehingga timbul pengangguran terutama lulusan di tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Mempertahankan anak supaya tetap belajar di sekolah sampai tamat, jauh lebih sukar dibandingkan mencari anak baru agar masuk sekolah atau menambuh bangku sekolah. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka tidak bersekolah lagi dari 62,91% pada tahun 1992 meningkat menjadi 66,3% pada tahun 1995. Kemungkinan persentase tersebut akan semakin meningkat dengan situasi



krisis ekonomi dewasa ini. Terjadinya putus sekolah pada anak tersebut disebabkan, banyak anak dan remaja yang lebih tertarik bekerja dari pada sekolah. Kemudian alasan remaja tidak bersekolah lagi berdasarkan SUSENAS Tahun 1992 dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa persentase tertinggi anak dan remaja tidak bersekolah karena faktor ekonomi 51% memberikan alasan tidak mem-

punyai biaya. Kemudian 14% menyatakan bahwa pendidikan dianggap cukup. Data di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya pengetahuan orang tua akan menentukan partisipasi anak untuk menyelesaikan sekolahnya. Oleh sebab itu perlu kiranya memperluas pengertian pada masyarakat akan arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai suatu bentuk investasi.



Gambar 1. Alasan Anak dan Remaja Umur 5-24 tahun tidak bersekolah lagi (Data: BPS 1995)

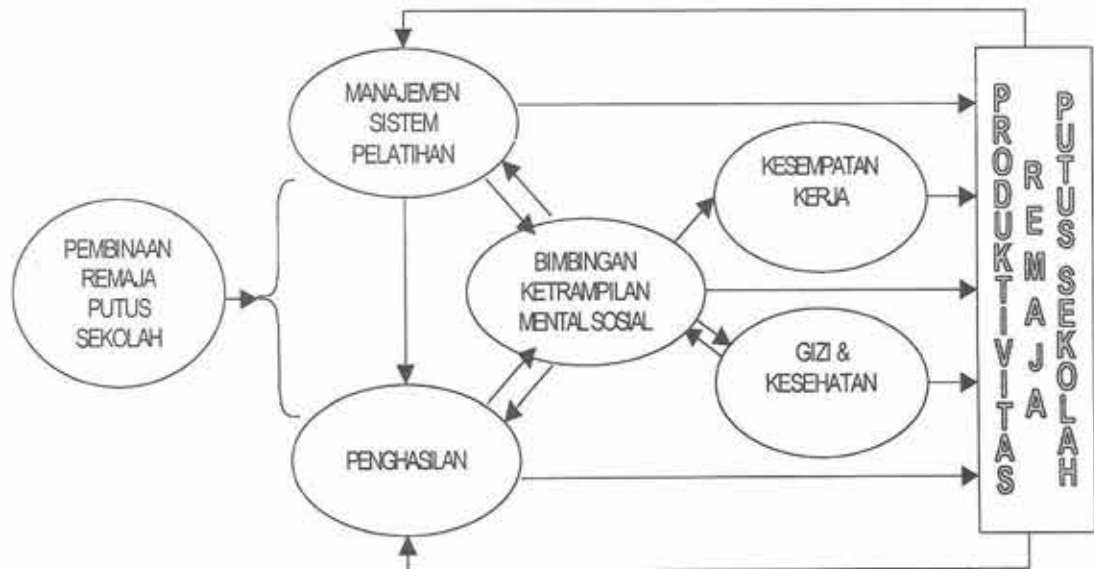
Berdasarkan penilaian di atas, maka program pelatihan bimbingan ketrampilan/mental/sosial memiliki posisi strategis untuk meningkatkan produktivitas remaja putus sekolah. Salah satu masalah yang kita hadapi dewasa ini adalah keterbatasan kesempatan kerja. Pertumbuhan eko-

nomi di bawah 5% setiap tahun sejak awal tahun 1980-an mengakibatkan kesempatan kerja yang diciptakan lebih kecil dari pertambahan angkatan kerja setiap tahun. Angka tersebut makin rendah akibat adanya krisis ekonomi, dan angka penganggur penuh dan setengah penganggur pun terus bertambah.

## 2.2. Pembinaan remaja putus sekolah

Program pembinaan remaja putus sekolah merupakan upaya untuk menanggulangi permasalahan sosial,

terutama masalah pengangguran usia muda. Model yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas remaja putus sekolah dapat dilukiskan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model pengembangan produktivitas remaja putus sekolah pada Panti Sosial Bina Remaja

Model tersebut di atas memungkinkan para kelayan secara intensif menerima pelatihan bimbingan fisik, mental, sosial maupun ketrampilan selama 6 bulan dan tinggal di asrama, sehingga dapat dipantau oleh pekerja sosial yang bertindak sebagai orang tua asuh.

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan lingkungan pekerja dan kebijaksanaan pemerintah secara keseluruhan, seperti pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim

kerja, hubungan industrial, teknologi, sarana produksi, manajemen, kesempatan berprestasi, dan kebijaksanaan pemerintah di bidang produksi, investasi, perijinan, teknologi, moneter, fiskal, harga, distribusi, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam 5 faktor utama, yaitu:

### 1. Pendidikan dan Latihan

Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat. Latihan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan dan latihan seseorang, semakin tinggi pula tingkat produktivitas-



nya.. Menurut pendapat Benne (1990: 377) pelatihan merupakan proses pendidikan kembali, berarti seseorang harus menjalankan tugas dengan merubah sikap tingkah lakunya yang pada dasarnya sama dengan perubahan budaya

#### 2. Gizi dan kesehatan

Keadaan gizi dan kesehatan yang baik memberikan kemampuan serta kesegaran fisik dan mental seseorang dalam melakukan pekerjaan. Semakin baik keadaan gizi dan kesehatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Keadaan gizi dan kesehatan yang rendah dalam masyarakat secara tidak langsung menimbulkan produktivitas kerja yang rendah karena tingkat pendidikan dan ketrampilan umumnya rendah juga.

#### 3. Penghasilan dan Jaminan Sosial

Penghasilan dan jaminan sosial, dalam arti imbalan atau penghargaan, ternyata dapat menjadi pendorong atau insentif untuk bekerja lebih giat atau lebih produktif. Dalam perusahaan-perusahaan, pemberian penghasilan dan jaminan sosial tercermin dalam sistem pengupahan.

#### 4. Kesempatan kerja

Tingkat produktivitas seseorang juga sangat tergantung pada kesempatan yang terbuka padanya. Kesempatan dalam hal ini sekaligus berarti:

- 1) kesempatan untuk bekerja,
- 2) kesempatan melakukan pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan ketrampilan setiap orang, dan
- 3) kesempatan mengembangkan diri.

Ketrampilan dan produktivitas seseorang berkembang melalui dan didalam pekerjaan. Keterampilan tertentu yang tidak diterapkan dalam jangka waktu tertentu akan hilang sama sekali. Sebaliknya ketrampilan

yang diterapkan secara terus menerus akan dapat berkembang. Oleh karena itu peningkatan produktivitas kerja dalam masyarakat, erat hubungannya dengan usaha menghindari pengangguran, terutama pengangguran usia muda yang berasal dari remaja putus sekolah. Maka dalam pelaksanaan bimbingan ketrampilan pada Panti Sosial Bina Remaja, para remaja yang sudah memperoleh ketrampilan selama 4 bulan diharuskan mengimplementasikan ketrampilannya melalui praktek lapangan selama 2 bulan.

#### 5. Peningkatan kemampuan manajerial

Prinsip manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan. Pendekatan manajemen sering disebut "*Technical Efficiency*." Asumsi yang dipakai untuk meningkatkan tingkat efisiensi dari suatu organisasi adalah peningkatan produktivitas dilakukan melalui manipulasi manajerial sumber-sumber yang dipergunakan secara optimal.. Oleh sebab itu ,perlu dikembangkan manajemen sistim pelatihan integratif antara instansi pemerintah terkait dan pihak pengusaha, dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); melalui pelatihan integratif dengan sistim ganda tersebut para kelayan Panti Sosial bina remaja memperoleh bekal ketrampilan yang sesuai dengan permintaan pasaran kerja.

---

### 3. PENINGKATAN EFISIENSI PELATIHAN BIMBINGAN MENTAL/SOSIAL DAN KETERAMPILAN PADA PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Tingkat efisiensi sumber daya dan dana bagi pelatihan bimbingan pada Panti Sosial Bina Remaja putus sekolah baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah rendah. Untuk itu perlu

diupayakan peningkatan efisiensi mengingat kondisi krisis ekonomi dewasa ini yang berdampak pada menurunnya APBN sebesar 17,31% dibanding tahun 1998 (Kompas, 6/1/99). Apalagi tahun 2001 dengan defisitnya APBN, akan berpengaruh langsung pada anggaran beberapa instansi pemerintah, sehingga peningkatan efisiensi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan sosial menjadi semakin diperlukan. Alasan penting lainnya adalah masih banyaknya anggapan bahwa program rehabilitasi dan pelayanan sosial merupakan program yang bersifat karitatif, bukannya program investasi sumber daya manusia atau bentuk investasi jaring pengaman sosial.

Pada dasarnya pemberian rehabilitasi dan pelayanan sosial juga merupakan upaya melaksanakan perubahan yang terencana dalam bentuk pemberdayaan manusia. Oleh sebab itu, program pelatihan dan bimbingan sosial juga merupakan bentuk dari proses pendidikan, sebab pada dasarnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan. Robinson (1994: 7) menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya juga merupakan komoditi yang dapat dikategorikan sebagai barang konsumsi (yang segera dapat dinikmati secara langsung dalam waktu yang relatif pendek) misalnya para remaja putus sekolah, setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Pantii Sosial Bina Remaja, akan segera meningkat pengetahuan dan ketrampilannya.

### 3.1. Efisiensi Internal Pelatihan Bimbingan Sosial pada Pantii Sosial Bina Remaja

Dalam rangka untuk mengetahui efisiensi biaya pelatihan bimbingan ketrampilan dan mental sosial internal secara individual diperlukan perhitungan ongkos riil rata-rata untuk menghasilkan satuan output. Penghitungan efisiensi internal menurut Widham ada beberapa teknik antara lain: *Least cost analysis*, *cost effectiveness analysis*, *marginal rate of technical*. Metode penghitungan efisiensi internal yang banyak dipakai adalah *cost effectiveness*. Caranya adalah dengan membagi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dan bimbingan sosial dengan seluruh jumlah peserta didik. Dengan membandingkan *unit cost* per peserta didik untuk semua jenis program pendidikan maka dapat diketahui efisiensi secara internal. Untuk mengetahui efisiensi internal dilakukan perbandingan satuan *unit cost* antara metode sistem panti dan non panti.. Penghitungan efisiensi yang banyak dipergunakan adalah teknik *unit cost effectiveness* yaitu menghitung biaya riil rata-rata yang dikeluarkan dalam proses pelatihan/pendidikan untuk menghasilkan suatu satuan *Out put*. Cara menghitungnya adalah membagi seluruh biaya kebutuhan riil yang digunakan dalam proses bimbingan mental, sosial dan ketrampilan kerja kepada remaja putus sekolah, dengan jumlah peserta didik (kelayan) di Pantii Sosial Bina Remaja; maka *unit cost* program pendidikan/pelatihan yang secara internal paling efisien dapat ditetapkan. Tabel 1 menyajikan contoh perbandingan efisiensi penyantunan bagi 100 orang remaja putus sekolah antara sistem panti dengan non panti.

Tabel 1  
Unit cost Kelayan Panti Sosial Bina Remaja

No	Satuan input	metode panti (dalam panti)	metode non panti (luar panti)
1	Pekerja sosial/ Administrasi	150	60
2	Peralatan	100	80
3	Sarana Transportasi	50	80
4	Bahan/Buku	80	110
5	Bangunan	20	10
6	Tanah	40	20
	Jumlah	440	360

Metode dalam panti satuan inputnya untuk penyantunan bagi 100 orang adalah 440, sedangkan metode luar panti (Non panti) bagi 60 orang satuan inputnya sebesar 360., untuk mengetahui berapa besar *unit cost* setiap orang dilakukan perhitungan sebagai berikut a. *Unit cost* metode dalam panti untuk setiap orang  $440 : 100 = 4,4$  b. *Unit cost* metode luar panti (Non panti) untuk setiap orang  $360 : 60 = 6$ . Dari penghitungan ini diketahui ternyata *unit cost* metode dalam panti lebih rendah (sebesar 4,4) lebih rendah daripada metode luar panti (sebesar 6). Berarti metode dalam panti lebih efisien di banding dari pada pelayanan luar panti..

### 3.2. Perhitungan Efisiensi Eksternal Pelatihan/Bimbingan Sosial Pada Panti Sosial Bina Remaja

Evaluasi efisiensi eksternal dipergunakan teknik *Cost Benefit Analysis* dengan cara membandingkan *benefits* dengan *cost* dari suatu kegiatan program. Dalam pelatihan dan bimbingan sosial pada Panti Sosial Bina Remaja yang dibandingkan adalah keuntungan (*benefit*) seseorang yang diperolehnya dari

bekerja setelah selesai sekolahnya dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan selama proses pelatihan. Biaya yang dimaksud mencakup pula biaya kesempatan (*opportunity cost*); kemudian yang dimaksud *benefit* adalah hasil moneter yang diperoleh dari penghasilan kerja sebelum dikurangi pajak. Komponen *benefit* antara lain gaji, tunjangan bonus, perumahan dan sebagainya pendapatan riil yang diterima seseorang. (perhitungan *cost-benefit*) Teknik yang banyak digunakan dalam *Cost benefit analysis* dengan menggunakan perhitungan *Internal rate of return* (IRR). Hasil perhitungan IRR pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat sosial (*Social Rate Return*) menggambarkan koefisien keuntungan yang diperoleh oleh negara dengan menginvestasikan dananya di suatu program pelatihan, bimbingan sosial ketrampilan kerja seperti halnya di Panti Sosial Bina Remaja. Selanjutnya *Private Rate Return*. menggambarkan koefisien keuntungan pribadi dari investasinya mengikuti program pelatihan/ bimbingan ketrampilan Kemudian untuk kepentingan kebijakan pemerintah lebih banyak dihitung *Social Rate Return* Selanjutnya untuk kepentingan individu peserta pe-



latihan/ bimbingan sosial ketrampilan kerja maka *Privat Rate Return* yang dipergunakan. Penghitungan efisiensi eksternal tidak banyak dilakukan, sebab membutuhkan waktu yang lama serta membutuhkan biaya banyak untuk pengumpulan data yang akurat. Apabila ingin mengetahui *Rate of Return* dipergunakan *Short Cut Method* (Psacharopoulos, 1987), dengan rumus:

$$R_h = \frac{W_h - W_{h-1}}{s_h(C_h + W_{h-1})} \text{ dengan } R_h =$$

"rate of return" dari jenis pendidikan h;  $W_h$  = keuntungan lulusan jenis pendidikan h;  $W_{h-1}$  = keuntungan lulusan jenis pendidikan satu tingkat di bawah tahun berikutnya;  $s_h$  = lamanya waktu rata-rata untuk menyelesaikan jenis pendidikan h;  $C_h$  = biaya langsung untuk jenis pendidikan h.

Untuk penghitungan efisiensi eksternal diperlukan penelitian evaluasi secara longitudinal beberapa tahun. Oleh sebab itu sebagai contoh penghitungan dapat ditampilkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dr. Mulyani Nurhadi mengenai "Studi efisiensi eksternal lulusan SMTA Kejuruan di Kawasan Pengembangan Industri VIII Gresik Jawa Timur" yang ingin menguji seberapa besar tingkat efisiensi eksternal SMKTA kejuruan di dunia industri manufaktur. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pertimbangan ekonomik (berdasarkan perhitungan efisiensi eksternal) untuk mengambil kebijakan pengembangan SMA umum, dikaitkan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dan efisien bagi dunia industri manufaktur. Adapun jumlah sampel adalah 574 orang yang terdiri dari karyawan yang berpendidikan den-

gan persentase SMA umum sebesar 36,9%, STM dan SMP masing-masing sebesar 16,6%.

Data lengkap tentang keuntungan, biaya dan hasil perhitungan "*rate of return*" disajikan pada Tabel 2. Untuk menghitung efisiensi eksternal diperlukan penelitian *longitudinal* selama beberapa tahun. Estimasi jenis pendidikan terhadap penghasilan kerja dilakukan dengan regresi biasa. Ini ditempuh guna memperoleh estimasi rincian keuntungan dan macam biaya sebagai dasar perhitungan analisis "*Rate of return*" seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa efisiensi eksternal lulusan SMA pria adalah terendah, dibandingkan dengan lulusan STM dan SMA. Ini berarti bahwa jenis pendidikan yang berhasil memberikan nilai efisien eksternal adalah SMA umum dengan nilai persentase yang tertinggi; untuk pria *rate of return* sosial (RRS) 23,21% dan *rate of return* pribadi (RRP) 25,14%, dan untuk wanita RRS 31,90% dan RRP 35,65%. Ini mengindikasikan bahwa program pendidikan SMA umum ternyata sangat efisien, karena penyelenggaraan SMA umum tidak membutuhkan investasi yang besar terbukti dengan tingginya output "*rate of return*." Adapun tingginya efisiensi eksternal disebabkan rendahnya *unit cost* efisiensi internal untuk penyelenggaraan SMA umum. Sementara investasi penyelenggaraan STM/SMKTA kejuruan lainnya membutuhkan investasi yang lebih besar, sebab harus mengeluarkan investasi peralatan praktek. Selain itu, waktu penyelesaian studi, serta produktivitas tamatan STM/SMKTA kejuruan setelah mereka bekerja di industri rendah. Hasil penelitian Mulyani menunjukkan, pada awal mereka bekerja, lulusan SMA umum menerima penghasilan kerja jauh lebih

rendah dari lulusan STM, SMEA dan sekolah menengah kejuruan lainnya,

sebab produktivitasnya masih rendah.

Tabel 2.

Rincian Keuntungan dan Macam Biaya Sebagai Dasar Perhitungan Analisis "Rate of Return" Untuk Tiap-tiap Jenis Pendidikan (dalam ribu rupiah)

Kategori	Jenis Pendidikan SMTA			
	SMA	SMEA	STM	SMKTA
Pria: Keuntungan (tahun1989)	2860	1870	2354	2994
Pria: Biaya "opportunity" (tahun1989)	1495	1495	1495	1495
Wanita: Keuntungan (tahun1989)	2396	1406	1890	2530
Wanita: Biaya "opportunity" (tahun1989)	1031	1031	1031	1031
Pria & Wanita				
Biaya sosial (tahun1982)	82,2	86,2	127,2	127,2
Biaya sosial (tahun1989)	130,64	136,99	202,15	202,15
Biaya pribadi: (tahun1982)	49,6	49,6	49,6	49,6
Biaya pribadi: (tahun1989)	78,83	78,83	78,83	78,83
<i>Seluruh biaya</i>				
Sosial langsung (tahun1982)	131,8	135,8	176,8	176,8
Sosial langsung (tahun1989)	209,47	215,82	280,98	280,98
<i>Rata-rata Waktu Sekolah (dalam tahun)</i>	3,45	3,33	4,58	4,58
<i>Pria: Rate of Return Sosial (RRS)</i>	23,21 25,14	6,58 7,16	10,56 11,92	18,43 20,80
<i>Pria: Rate of Return Pribadi (RRP)</i>				
<i>Wanita: Rate of Return Sosial (RRS)</i>	31,90 35,65	9,03 10,15	14,30 16,30	24,95 29,49
<i>Wanita: Rate of Return Pribadi (RRP)</i>				

Akan tetapi setelah lulusan SMA tersebut melalui *on the job training* secara informal guna memperoleh ketrampilan kerja khusus yang diperlukan oleh perusahaan, setelah 4 tahun bekerja ternyata lulusan SMA umum lebih produktif dibandingkan lulusan STM dan SMEA/SMKTA kejuruan. Ini mengindikasikan kemampuan umum yang dipunyai remaja lulusan SMA umum telah memberikan bekal yang baik untuk menguasai ketrampilan dan lebih produktif (Nurhadi, 1999: 8).

#### 4. KESIMPULAN

Panti Sosial Bina Remaja merupakan wahana pelatihan dan rehabilitasi sosial remaja putus sekolah. Tujuan dari program tersebut adalah membantu mempersiapkan anak putus sekolah terlantar dengan cara memberikan kesempatan dan kemudahan agar mereka: (a) mampu mengembangkan potensi jasmani, rohani, serta sosialnya, dan (b) memperoleh ketrampilan kerja sebagai bekal kehidupan dan pen-

ghidupannya di masa depan supaya tumbuh kemandiriannya. Cara yang ditempuh adalah mengembangkan model pengembangan produktivitas remaja putus sekolah, serta manajemen sistem pelatihan yang integratif antara instansi terkait dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (AP-INDO). Dengan metode integratif tersebut diharapkan kelayan akan memperoleh bekal ketrampilan yang sesuai dengan pasar kerja dan peluang kerja.

Tingkat efisiensi pelatihan dan bimbingan sosial pada Panti Sosial Bina Remaja dipandang masih rendah sehingga target kualitas belum tercapai. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi program pelatihan dan bimbingan sosial, baik internal maupun eksternal. Supaya akuntabilitas program lebih tinggi perlu dilakukan evaluasi efisiensi. Efisiensi internal dapat dievaluasi dengan metode *cost effectiveness analysis*. Salah satu tekniknya adalah menghitung *unit cost*. Caranya yaitu membagi seluruh biaya riil yang telah digunakan dengan seluruh jumlah kelayan yang mengikuti bimbingan sosial dan ketrampilan kerja di Panti Sosial Bina Remaja. Efisiensi eksternal dievaluasi menggunakan metode *short-cut* untuk mengetahui *Social Rate of Return* dan *Private Rate Return* tersebut diperlukan penelitian evaluasi secara *longitudinal* selama beberapa tahun sehingga dapat diperoleh data perkembangan keluaran (*output*). Penghitungan efisiensi eksternal tidak banyak dilakukan sebab biayanya mahal dan waktunya lama. Apabila tingkat efisiensi pelatihan dan bimbingan sosial dapat ditingkatkan maka pemborosan dapat diatasi sehingga tertib

administrasi dan operasional dapat meningkat.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B., 1988, *Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Apple Michael W, 1994, *Curriculum in the Year 2000, Tensions and Possibilities*, in Leonard Gabgan dan Janne H. Hallantine., Sociological Foot Print Belmont California. Wadsworth. Publishing Company.
- Biro Statistik, 1996, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, Jakarta.
- Combs, P.H., Ahmed, M., 1974, *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan melalui Pendidikan Non-Formal*, Rajawali, Jakarta.
- Dunn. W.N., 1995, *Public Policy Analysis an Introduction*, disadur oleh DR. Mohadjir Darwin, PT Handita Graha Widya Yogyakarta.
- Laporan kegiatan Triwulan I, 1997/1998, Panti Sosial Bina Remaja, Yogyakarta.
- Mehmet O., 1978, *Economic Planning and Social Justice in Developing Countries*, London.
- Muhadjir, N., Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rakasarasin, Yogyakarta.
- Maureen Woodhall, 1970. *Cost Benefit Analysis in Educational Planning*, United Nations, Educational Scientific and Cultural Organization. by Centericed Loovain: Belgium.
- Muchdarsyah Sinungan, 1987, *Produktivitas, Apa dan Bagaimana*, Bina Aksara, Jakarta.



- Nurhadi, Mulyani, 1999, *Ekonomi Pendidikan*, kumpulan bahan kuliah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Psacharopoulos, George Maureen Wood Whall, 1985, *Education for Development*, Oxford University Press.
- Robinson Helja Antola, 1994, *The Ethnography of Employment*, London The Falmer Press.
- Seecha Alatas dan Rudi Bambang Trisilo, 1990, *Struktur Ketengakerjaan Indonesia, Dalam Ekonomi Sumber daya Manusia*: Lembaga Demografi Fak. Ekonomi dan Pusat Antar Universitas Indonesia. Jakarta.
- Todaro, M., 1978, *Economic Development in The Third World*, Longham Inc New York.
- Warren G. Bennis; Kenneth D. Benne, Robert Chin 1989 *The Planning of Change*, Alih Bahasa Wilhelmus. W. Bokowatun SE, Intermedia, Jakarta.
- World Bank, 1985, *Indonesia: Policies for Growth and Employment (Part II: Employment Trends and Outlook)* Report No. 5597. Ind. Washington.